

## **KAJIAN TEORITIS TENTANG KONSTRUKSI MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM**

**Nelli Murodah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: nellimurodah@staikap.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan konstruksi teoritis tentang manajemen lembaga pendidikan Islam. Penelitian kualitatif ini berupa kajian pustakan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data penelitian menggunakan referensi dari berbagai literatur ilmiah yang memiliki relevansi erat terhadap objek pokok bahasan dalam penelitian. Kemudian, tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai teknik analisa data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat lima aspek fundamental dalam konstruksi manajemen lembaga pendidikan Islam yang mencakup manajemen personalia, peserta didik, kurikulum, keuangan, dan sarana pra sarana. Kelima manajemen tersebut diharapkan dapat bekerja sinergis, sehingga diharapkan dapat membangun konstruksi manajemen lembaga pendidikan Islam yang baik. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang sistemik dan terukur.

**Kata Kunci:** Manajemen, Lembaga Pendidikan Islam

### **ABSTRACT**

*This research aims to describe the theoretical construction of the management of Islamic educational institutions. This qualitative research is a library study with a qualitative descriptive approach. The research data uses references from various scientific literature that has close relevance to the subject matter of the research. Then, the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing are used as data analysis techniques. The results concluded that there are five fundamental aspects in the construction of the management of Islamic educational institutions which include the management of personnel, students, curriculum, finance, and pre-facilities. The five managements are expected to work synergistically, so that it is expected to build a good Islamic education institution management construction. This research contributes to the urgency of a systemic and measurable management strategy of Islamic educational institutions.*

**Keywords:** Management, Islamic Educational Institutions

## **PENDAHULUAN**

Tidak dapat disangkal bahwa manajemen merupakan suatu hal penting yang berperan besar pada seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Juga telah dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat.

Adapun pentingnya manajemen lembaga pendidikan Islam tidak terlepas dari berbagai persoalan kelembagaan yang kompleks dan mencakup berbagai hal, seperti kegiatan belajar mengajar, kondisi para didik, materi pembelajaran, kondisi keuangan, dan juga sarana atau fasilitas lembaga untuk menunjang aktifitas kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini untuk bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi teoritis tentang manajemen lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini urgen dilakukan, karena dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praksis terkait kebijakan pengelolaan manajemen lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini urgen.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus pembahasan yang menjadi objek pokok dalam penelitian ini, yakni untuk mendeskripsikan berbagai aspek fundamental yang menjadi pondasi dalam konstruksi manajemen lembaga pendidikan Islam. Untuk menjawab pokok bahasan penelitian tersebut, penelitian ini diklasifikasikan dalam kategori penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengurai pembahasan pokok penelitian yang ada. Selanjutnya, berbagai literatur ilmiah yang relevan terhadap pokok bahasan dijadikan sebagai data penelitian. menggunakan referensi dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Berikutnya, analisa data dalam penelitian ini mencakup tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Personalia Pendidikan Islam**

Manajemen personel merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, sehingga mereka dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutomo, 2006). Keberhasilan manajemen personalia ini sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan

prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern (Mulyasa, 2003).

Menejemen personalia pendidikan Islam ini bertujuan untuk mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan Islam, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Menejemen personalia (pendidik dan tenaga kependidikan) mencakup. Pertama, perencanaan. Adapun perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan (Sulistiyorini, 2009). Kedua, pengadaan. Terkait pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya (Mulyasa, 2003). Ketiga, pembinaan dan pengembangan karier. Fungsi pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara *on the job training* dan *in service training*. Keempat, promosi dan mutasi. Di Indonesia, untuk ASN, promosi dan pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon ASN dengan masa percobaan satu atau dua tahun, kemudian ia mengikuti latihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat sebagai ASN penuh. Setelah pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan (Sulistiyorini, 2009). Kelima, pemberhentian. Terkait pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja, baik sebagai pendidik maupun sebagai tenaga kependidikan dengan organisasi atau lembaga tempat bekerja. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Keenam, kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan organisasi atau lembaga, pendidik maupun tenaga kependidikan, dan juga pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2010). Ketujuh, penilaian. Berkaitan dengan penilaian pendidik maupun tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah (Mulyasa, 2003). Biasanya unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan (Sutomo, 2006).

### **Manajemen Peserta Didik Pendidikan Islam**

Manajemen peserta didik adalah upaya penataan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah/madrasah, dengan cara memberikan layanan sebaik

mungkin kepada peserta didik. Manajemen peserta didik ini menempati posisi yang sangat penting, karena sentral layanan pendidikan di sekolah adalah peserta didik. Semua kegiatan yang ada di sekolah, diarahkan agar peserta didik mendapat layanan pendidikan yang baik dan tercipta suasana belajar yang kondusif. Selain itu, tujuan dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran, sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan teratur serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Secara umum, fungsi dari manajemen peserta didik ini adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan ataupun potensi lainnya (Baharudin & Makin, 2010). Sedangkan Menurut Eka Prihatin dalam Kompri bahwa fungsi dari keberadaan manajemen peserta didik antara lain:

1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yaitu agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terlambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.
2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial, yaitu agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebaya, dengan orang tua serta keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial.
3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yaitu agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Dengan demikian dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.
4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia juga akan turut memikirkan kesejahteraan sebayanya (Kompri, 2015).

Selain fungsi di atas, ada beberapa prinsip dalam manajemen peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Dalam mengembangkan program manajemen kepeserta didikan, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan.
2. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah/madrasah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan.
3. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2010).
4. Manajemen peserta didik diupayakan mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
5. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.

6. Kegiatan manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah/madrasah, terlebih dimasa depan. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah/madrasah harus memiliki tanggungjawab penuh membawa peserta didik ke arah yang diidamkan oleh masyarakat sesuai dengan kodrat dan karakteristiknya masing-masing.

Tim Pakar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang dalam Baharuddin dan Moh. Makin, mengidentifikasi beberapa ruang lingkup manajemen peserta didik antara lain:

1. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah *school census*, *school size*, dan *effective class*.
2. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan kebijakan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, pemecahan problem-problem penerimaan peserta didik.
3. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan-pengaturan, antara lain: hari-hari pertama peserta didik di sekolah/madrasah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik dan teknik-teknik orientasi peserta didik.
4. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah/madrasah. Termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang membolos, terlambat datang dan meninggalkan sekolah/madrasah sebelum waktunya.
5. Mengatur pengelompokan peserta didik, baik yang berdasarkan fungsi persamaan maupun berdasarkan fungsi perbedaan.
6. Mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun untuk kepentingan promosi peserta didik.
7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan *drop out*.
9. Mengatur kode etik, pengadilan, dan peningkatan disiplin peserta didik.
10. Mengatur layanan pendidikan peserta didik.
11. Mengatur organisasi peserta didik (Baharudin & Makin, 2010).

### **Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam**

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan (Kurniasih & Sani, 2013). Dalam kurikulum, manajemen kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Sehingga dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ataupun Kurikulum 2013 bagi yang sudah menerapkannya. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi

lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil yang lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum diantaranya:

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, artinya pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui perencanaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, artinya kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, artinya kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktifitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, artinya dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, artinya bahwa proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, artinya bahwa kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

Selain fungsi tersebut di atas, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

1. Produktivitas, artinya hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, artinya pelaksanaan manajemen kurikulum harus beraskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3. Kooperatif, artinya untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi, artinya rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, artinya bahwa proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2010).

Dalam kurikulum terdapat sejumlah hal yang mendukung terhadap proses manajemen kurikulum, diantaranya:

1. Faktor peserta didik dalam mengembangkan kurikulum karena kurikulum dikembangkan dan didesain sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, maka pola yang digunakan berpusat pada bahan ajar berupa isi atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik.
2. Faktor sosial budaya dalam manajemen kurikulum karena kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan tekanan serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.
3. Faktor politik dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang berpengaruh karena politik yang melandasi arah kebijakan dari pengembangan kurikulum itu sendiri.
4. Faktor ekonomi dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang memiliki pengaruh yang cukup besar karena faktor ekonomi yang dapat mengembangkan sekaligus mendorong pola pengembangan kurikulum mulai dari pelaku kebijakan sampai pada pelaku di lapangan (di sekolah-sekolah).
5. Faktor perkembangan teknologi dalam manajemen kurikulum karena perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan kurikulum disebabkan pola pikir masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangan teknologi sehingga dituntut untuk dapat melihat dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Kompri, 2015).

### **Manajemen Keuangan Pendidikan Islam**

Definisi manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Adapun menurut Maisyarah dalam Sulistyorini bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.

Sumber keuangan pada suatu sekolah/madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

1. Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
2. Orang tua atau peserta didik.
3. Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat (Sulistiyorini, 2009).

Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah/madrasah dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Pembiayaan rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (pendidik dan tenaga kependidikan), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara pembiayaan pembangunan seperti biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, penambahan *furnitur*, serta biaya pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai (Baharudin & Makin, 2010).

Melalui kegiatan manajemen keuangan, kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan sekolah adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam manajemen keuangan pendidikan Islam juga perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Transparansi, berarti adanya keterbukaan.
2. Akuntabilitas, berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas, artinya jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan sekolah dan kualitatif *outcomes*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi, berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan (Husni, 2015).

### **Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam**

Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan proses perencanaan pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif

dan efisien. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penginvestasian, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan (Rohiat, 2008).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya bertujuan:

1. Menciptakan sekolah/madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi masyarakat sekolah/madrasah.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan.

Secara lebih rinci, Tim Pakar Manajemen Universitas Negeri Malang dalam Baharuddin dan Moh. Makin mengidentifikasi beberapa hal tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu:

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah/madrasah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah/madrasah memiliki sarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien.
3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaan sarana dan prasarana selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap waktu diperlukan oleh semua personalia sekolah (Baharudin & Makin, 2010).

Menurut Bafadal seperti dikutip Sulistyorini bahwa dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah.
2. Prinsip efisiensi, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan.
3. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
4. Prinsip kejelasan tanggungjawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggungjawab, apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam menejemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap personel sekolah.
5. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompleks (Sulistyorini, 2009).

## KESIMPULAN

Mengacu pada bahasan pokok penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai aspek fundamental dalam konstruksi manajemen lembaga pendidikan Islam mencakup yang mencakup manajemen personalia, peserta didik, kurikulum, keuangan, dan sarana pra sarana. Kelima manajemen tersebut diharapkan dapat bekerja sinergis, sehingga diharapkan dapat membangun konstruksi manajemen lembaga pendidikan Islam yang baik.

Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang sistemik dan terukur. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian teoritis dan konseptual. Oleh karena itu, penting penelitian lebih lanjut pada aspek implementasi di lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, & Moh Makin. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*. Malang: UIN Maliki Press
- Husni, Karna. (2015). *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Kompri. (2015). *Manajemen Sekolah: Orientasi Kemandirian Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniasih, Imas, & Berlin Sani. (2014). *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013: Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013*. Surabaya: Kata Pena
- Mulyasa, E. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rohiat. (2008). *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik, Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras
- Sutomo. (2006). *Manajemen Sekolah*. Semarang: Unnes Press
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2010). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta